

KCBS



RANHIR

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Kecamatan Bekasi Selatan
Kota Bekasi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum	13
1.3 Maksud dan Tujuan.....	16
1.4 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	19
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	19
2.1.1 Faktor-Faktor Penyebab tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan.....	39
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan.....	41
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bekasi Selatan	44
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	48
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	63
BAB III.....	70
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	70
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	70
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bekasi Selatan	72
3.2.1 Tujuan.....	75
3.2.2 Sasaran.....	75
3.3 Program dan Kegiatan	77
BAB IV.....	74
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	74

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bekasi Selatan.....	74
BAB V.....	94
5.1 Kaidah Pelaksanaan	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BEKASI SELATAN.....	24
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.....	42
Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Bekasi....	51
Tabel 4 Daftar Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan Bekasi Selatan TA. 2025	69
Tabel 5 Usulan Telaahan Program dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6 Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bekasi Selatan.....	76
Tabel 7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.....	78
Tabel 8 Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Tahun 2024.....	74
Tabel 9 Program Dan Pagu Indikatif Kegiatan Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025.....	75

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, berkat karunia Allah SWT, tim penyusun rencana kerja Kecamatan Bekasi Selatan Pemerintah Kota Bekasi dapat menyelesaikan tugas penyusunan “RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI SELATAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 “.

Rencana Kerja secara garis besar memuat rencana kegiatan Kecamatan Bekasi Selatan untuk tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bekasi Selatan 2024-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami berharap Rencana Kerja 2025 yang kami susun kiranya dapat menjadi pedoman bagi aparatur Kecamatan Bekasi Selatan, khususnya Stakeholder dan pihak lain dalam melaksanakan semua proses pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan.

CAMAT BEKASI SELATAN

KARYA SUKMAJAYA, S.AP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720402 199901 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*

Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur, mengamanatkan secara lugas bahwa setiap daerah harus Menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Di Era Otonomi Daerah ini terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah dari sistem top-down (dari atas ke bawah) menjadi bottom-up (dari bawah ke atas) artinya Kepentingan Masyarakat menjadi prioritas utama, untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu Penyelenggaraan Pemerintah Yang Efektif, Efisien, Partipatif, Transparan dan Akuntabel.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bekasi yang jabatan Kepala Daerahnya akan berakhir di Tahun 2023 dan masa berlaku RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 juga akan berakhir pada Tahun 2023 serta RPJPD Kota Bekasi 2005-2025 yang akan berakhir di Tahun 2025, maka Pemerintah Kota Bekasi menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 serta Rencana Kerja Perangkat Daerah.

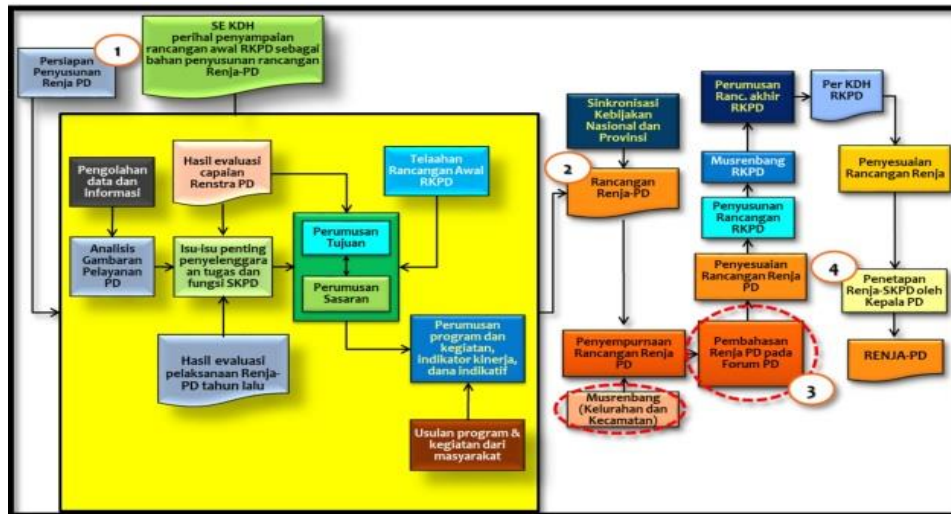
Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Fungsi Renja PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD

dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Dalam Pembangunan Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Kecamatan Bekasi Selatan harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sesuai dengan peraturan tersebut.

Dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang maka terbentuklah penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diselaraskan dengan rancangan Renja Kecamatan Bekasi Selatan.

Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan rencana, pada tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional dan dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP yang mana Rancangan RKP diserasikan melalui MUSRENBANG. Dari hasil MUSRENBANG maka Menteri menyusun Rancangan Akhir RKP dan atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat Kementerian/Lembaga penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan RENJA K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.

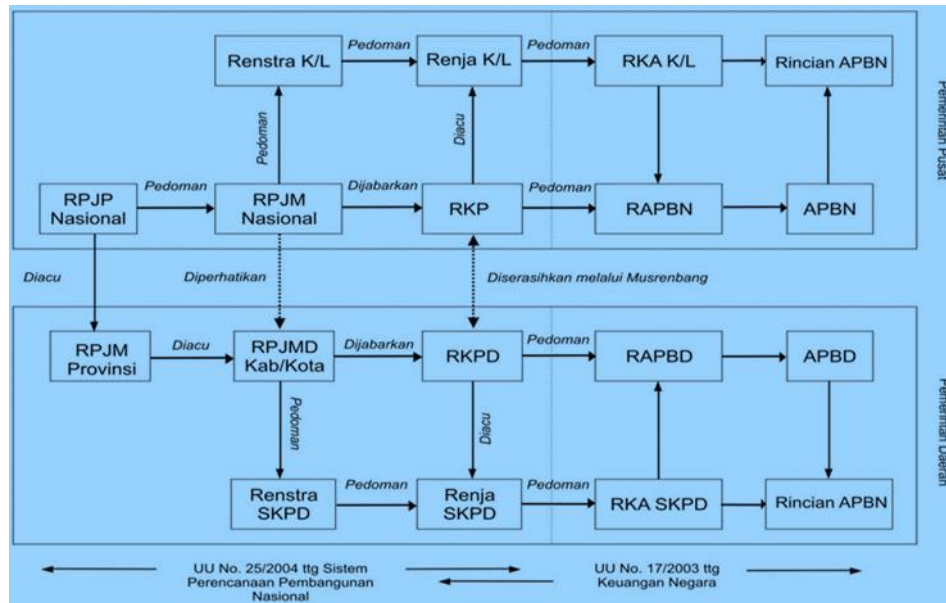


Gambar 1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD

Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pemerintah pusat dan K/L sangat erat kaitannya yaitu penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional dan dari RPJP Daerah kemudian diturunkan kedalam RPJM Daerah dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPD dan seperti halnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan ke RENJA OPD.

Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah harus menyusun RENSTRA Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya disusun RENJA Perangkat Daerah yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA Perangkat Daerah untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA Perangkat Daerah.

Dalam proses yang sama Pemerintah Daerah menyusun RKPD. Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses pembahasan di internal Perangkat Daerah maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappelitbangda Kota Bekasi dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2025.



Gambar 2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra K/L yang berpedoman pada RPJMN, dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Dokumen Renstra K/L adalah penjabaran RPJMN, terkait dengan program dan kegiatan Kementerian Kementerian/Lembaga dalam mendukung prioritas Presiden. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJM dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Bekasi Selatan tidak terlepas dari Rencana Kerja Provinsi Jawa Barat dimana Salah satu misinya adalah Meningkatkan Kualitas Perumusan Bahan Kebijakan

dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya akan semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Selatan akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas unggul, peningkatan peluang kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan Koperasi dan UMKM, termasuk pedagang pasar tradisional, mengembangkan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM, memperkuat pemberdayaan dan pengarusutamaan gender untuk kaum perempuan, lanjut usia, difabel, miskin dan perlindungan anak.

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Hubungan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan dengan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024 ini, selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, kondisi internal dan eksternal berupa potensi/tantangan dan isu strategis dalam 1 (satu) Tahun ke depan, dan juga memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024

ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi. Untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi tersebut diatas, dilaksanakan misi yang terdiri dari :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel;
2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah;
3. Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi;
4. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat untuk sehat;
5. Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan;
6. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan Pembangunan responsif Gender;
7. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota;
8. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan;
9. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi;
10. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat;
11. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat;
12. Meningkatnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana

Kecamatan Bekasi Selatan mendukung Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi pada point 1 dan point 5 yang memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Program Prioritas Kecamatan Bekasi Selatan adalah :

1. Program Pengembangan Layanan Publik Berbasis IT;
2. Program Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan intensif bagi ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid dan Kelompok penggerak sosial lainnya;
3. Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Sedangkan untuk menindaklanjuti proses RAPBD untuk diselaraskan dengan RKPD Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 adalah dengan melakukan keselarasan kegiatan oleh Kecamatan Bekasi Selatan untuk memastikan bahwa anggaran dan kegiatan yang akan atau telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran, untuk itu perumusan RKPD Kecamatan Bekasi Selatan harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.

Dengan melakukan proses diatas maka Program dan Kegiatan Prioritas di Kecamatan Bekasi Selatan akan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan serta akan mencapai hasil yang dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi antar instansi di Kecamatan Bekasi Selatan agar memastikan adanya sinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dan referensi dalam penyusunan Renja Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12 Seri D);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perecanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 01.A Seri E);

16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9 Seri E);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 12 Seri E);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerinah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
19. Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 000.7/8915/BAPPELITBANGDA.AP4EP tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Bekasi Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari perencanaan kinerja Kecamatan Bekasi Selatan adalah Sebagai pedoman untuk penetapan kinerja dalam mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Rencana kinerja ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) sasaran dan program kerja atas kegiatan-kegiatan kinerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan sejalan dan searah dengan misi atau tujuan akhir yang ingin dicapai Kecamatan Bekasi Selatan khususnya dan umumnya oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan adalah:

1. Sebagai landasan operasional penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2025.

2. Sebagai OPD *Supporting* (Pendukung) dalam rangka mencapai Tujuan RPD Kota Bekasi.
3. Menyusun strategi rencana pencapaian indikator kinerja pembangunan Kecamatan Bekasi Selatan selama tahun 3 Tahun sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan mengacu pada panduan Tata Cara Penyusunan Rancangan Rencana Kerja PD. Sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Bekasi Selatan, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Bekasi Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Bekasi Selatan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bekasi Selatan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bekasi Selatan
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bekasi Selatan
- BAB V PENUTUP
 - 5.1 Kaidah Pelaksanaan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD*

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah, tidak semua program yang telah direncanakan terealisasi 100%. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya aparatur mengakibatkan Kecamatan Bekasi Selatan belum semuanya dapat terelalisasi sesuai dengan program kerja yang direncanakan.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas aparatur dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan dan tentu akan menjadi modal dasar potensial yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dampak yang terjadi dari penjelasan diatas yaitu Kecamatan Bekasi Selatan harus dapat mensosialisasikan segala kebijakan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat mengenai Program-program yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Bekasi Selatan agar Masyarakat bisa merasakan dampak positif dari Program yang bersinggung langsung kepada Masyarakat. R

Kebijakan/Tindakan Perencanaan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Selatan untuk meningkatkan Pelayanan Publik antara lain melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat disetiap akhir semester yang targetnya telah ditetapkan dan harus tercapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), merenovasi ruang pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan agar Masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan merasa nyaman dan meningkatkan

kualitas pegawai Kecamatan melalui Bimbingan Teknik tentang Pelayanan Publik. Terkait dengan Kebijakan dan Tindakan Program Peningkatan dan Kenyaman Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan dalam hal ini kami akan melakukan pengawasan rutin terhadap titik K3 yang sudah ditetapkan persentase capaian sesuai dengan Indikator Kinerja .

Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah di susun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bekasi Selatan ini menyajikan Hasil Review terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Capaian Tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun 2024 yang sudah disahkan.

Realisasi program yang direncanakan sesuai yang telah ditentukan dan telah memenuhi target, dampak dari target capaian terhadap Renstra yaitu semua program yang dilaksanakan dan direncanakan dapat tercapai.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil.

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja

ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja program. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja dan Laporan Capaian Kinerja.

Indikator-indikator tersebut adalah Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

di Kecamatan Bekasi Selatan dan Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Bekasi Selatan. Indikator yang sesuai target dikarenakan adanya monitoring secara berkala (tiap triwulan) yang dilakukan oleh internal Kecamatan Bekasi Selatan dalam bentuk evaluasi internal. Selain itu, adanya peran serta masyarakat maupun stakeholder terkait mampu mendorong nilai capaian sesuai target. Kebijakan perencanaan dan penganggaran kedepan perlu terus dievaluasi sehingga diharapkan di tahun-tahun kedepan seluruh Program, Kegiatan dan sub Kegiatan tetap mencapai target bahkan melebihi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024 dan capaian Renstra Tahun 2024 Capaian Indikator Kinerja sasaran dalam Renja Kecamatan Bekasi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan tahun 2024 di targetkan pada Renstra Perubahan 2024-2026 yaitu sebesar 75,5%;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Bekasi Selatan memperoleh hasil IKM ditargetkan sebesar 85% pada Renstra Perubahan 2024-2026;

3. Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Bekasi Selatan pada Renstra Perubahan Kecamatan Bekasi Selatan ditargetkan sebesar 31% pada Renstra Perubahan 2024-2026.

Dalam mencapai sasaran tersebut, Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024 melaksanakan 5 Program yang terdiri dari 1 Program BLPU dan 4 Program BLU, 13 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan dan 5 Kelurahan. Program-program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana sebesar Rp 27.609.237.600,- yang di dukung dengan 7 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan
2. Program BLU yang dilaksanakan di Kecamatan dan 5 Kelurahan dialokasikan dana sebesar Rp. 12.408.000.000,-
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, alokasi dana sebesar Rp. 570.000.000,- didukung dengan 2 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, alokasi dana sebesar Rp. 11.658.000.000,- didukung dengan 2 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan;
 - c. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, alokasi dana sebesar Rp. 120.000.000,- didukung dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;
 - d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,- didukung dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.

Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan Renja dapat dilihat pada tabel 1

**Tabel 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BEKASI SELATAN
DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN BEKASI SELATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)***

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024-2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		KET
				TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN								
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
7.01.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	0%	0%	0%	0%	

PARAF KOORDINASI:	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-	-	
		Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1550 OB	1550 OB	-	-	-	-	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-	-	

		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	-	-	-	-	
7.01.01.2.05.11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	150 Orang	150 Orang	-	-	-	-	

		Perundang-Undangan							
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	-	-	-	-	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	-	-	-	-	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	

		undangan yang Disediakan							
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	-	-	-	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	0%	0%	0%	0%	

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	-	-	-	-	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	33 Unit	33 Unit	-	-	-	-	

	Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya							
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	-	-	-	-	
7.01.01.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	0%	0%	0%	0%	

7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan Bekasi Selatan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Pekayonjaya)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Kayuringinjaya)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	

7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jakasetia)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jakamulya)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Margajaya)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	0%	0%	0%	0%	0%	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Selatan	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekayonjaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kayuringinjaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jakasetia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jakamuya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Bekasi Selatan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/Ormas	7 Pokmas/Ormas	-	-	-	-	

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekayonjaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	279 Pokmas/Ormas	279 Pokmas/Ormas	-	-	-	-	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kayuringinjaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	269 Pokmas/Ormas	269 Pokmas/Ormas	-	-	-	-	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakasetia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	259 Pokmas/Ormas	259 Pokmas/Ormas	-	-	-	-	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakamulya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	123 Pokmas/Ormas	123 Pokmas/Ormas	-	-	-	-	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	51 Pokmas/Ormas	51 Pokmas/Ormas	-	-	-	-	

7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pekayonjaya)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kayuringinjaya)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jakasetia)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jakamulya)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Margajaya)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	

7.01.03.2.03.03	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib K3	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	100%	100%	0%	0%	0%	0%	

		Penugasan Kepala Daerah							
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD di atas, tidak semua program yang telah direncanakan terealisasi 100%. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya aparatur mengakibatkan Kecamatan Bekasi Selatan belum semuanya dapat terealisasi sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas aparatur dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan maka dari itu setiap tahunnya kami terus mengusulkan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal yang tentu akan menjadi modal dasar potensial yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

2.1.1 Faktor-Faktor Penyebab tidak Tercapainya, Terpenuhiya atau Melebihi Target Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program/kegiatan yang tidak tercapai dan tidak terpenuhinya dapat dilihat dari pencapaian indikator Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi sebagaimana berikut ini:
 - a. Kurangnya Koordinasi dan Pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak tercapai;
 - b. Keterlambatan dalam melakukan pembuatan dokumen yang sudah di tentukan melalui alokasi anggaran;
 - c. Adanya regulasi baru dan perubahan kebijakan yang menyebabkan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik;

- d. Perencanaan Kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian;
 - e. Belum Optimalnya sosialisasi terkait perubahan kebijakan sehingga terjadi keterlambatan informasi.
2. Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja program/kegiatan karena kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggarannya. Adanya partisipasi masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan.
3. Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja program/ kegiatan yang melebihi target adalah karena tuntutan, kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi di wilayah serta adanya peran aktif dan feedback yang baik dari masrakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan

2.1.2 Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra pada Kecamatan Bekasi Selatan

Adanya perubahan nomenklatur pada program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada pertengahan Renstra yang menyebabkan perubahan indikator kinerja dan target capaian program dan kegiatan pada Renstra Kecamatan Bekasi Selatan

2.1.3 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi untuk faktor- faktor penyebab tersebut

Kebijakan atau Tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- a. Kegiatan yang belum mencapai target harus dilakukan pencairan agar realisasi fisik dan realisasi anggaran tercapai;

- b. Meningkatkan Kualitas Penataan dan Kompetensi aparatur;
- c. Melakukan Peninjauan Kembali terhadap capaian indikator sasaran, program dan kegiatan;
- d. Meningkatkan Koordinasi berjenjangdan kontinu dengan aparatur, Instansi terkait dan masyarakat;
- e. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan capaian target secara berkala

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Kinerja pelayanan yang baik dari setiap pegawai pemerintah Kecamatan sangat mempengaruhi hasil pelayanan yang maksimal. Setiap pegawai dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun di dalam proses pelaksanaannya ditemukan beberapa masalah yang dapat menghambat kegiatan pelaksanaan tersebut.

Salah satunya adalah prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan layanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Rumusan masalah ini adalah sejauh mana kinerja pelayanan kepada masyarakat di kantor Kecamatan Bekasi Selatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan di Kecamatan yang sesuai dengan standar pelayanan dan fungsinya serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Saranannya

adalah perlu meningkatkan disiplin kerja aparaturnya dan kemampuan masing-masing petugas agar bisa diselesaikan dengan baik serta menambah fasilitas penunjang kegiatan pelayanan.

Aparatur Kecamatan dituntut untuk dapat menjadi motor penggerak pembangunan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga akan lebih memahami kondisi masyarakat. Untuk itu pendayagunaan kinerja, pegawai harus ditinggalkan, terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pelayanan publik.

Dalam Hal pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Selatan yang disertai pendanaan APBD Kota Bekasi, dapat disimpulkan tingkat kinerja yang cukup baik. Demikian halnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang tidak disertai pendanaan, dinilai sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari kondusifitas penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Bekasi Selatan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik inilah yang harus didukung dengan anggaran yang jelas, efisiensi dan efektif.

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN
		2023	2024	2025	2024	2024	2026	
Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai	75	76	76.5	-	-	75.5	
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82.5	82	82.5	-	-	83	
Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	Persentase	-	6%	7%	-	-	8%	

Pada Indikator Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan tahun 2024 memiliki target sebesar 76, berdasarkan pada Renstra Perubahan 2024-2026, maka kecamatan Bekasi Selatan harus bisa mempertahankan kinerja yang baik terhadap indikator Nilai AKIP pada tahun sebelumnya yaitu dengan target 71,5 dengan capaian target sebesar 75,52, sehingga pada tahun sebelumnya memiliki persentase capaian kinerja dengan perhitungan realisasi di bagi target di kali 100%. Sehingga pada tahun 2024 Kecamatan Bekasi Selatan harus melampaui target yang telah ditetapkan dalam Rensta Perubahan 2024-2026.

Pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Bekasi Selatan yang dilaksanakan pada semester I dan semester II tahun 2024 dimana masyarakat mengisi questioner yang harus diisi oleh masyarakat pengguna layanan. Setelah diolah data tersebut memperoleh hasil IKM.

Sehingga Kecamatan Bekasi Selatan pada tahun 2024 yaitu dengan Indeks 82.5 berdasarkan Renstra Perubahan 2024-2026, maka Kecamatan Bekasi Selatan harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan dari tahun sebelumnya, sehingga perhitungan capaian kinerja realisasi dibagi target dikali 100%. Kecamatan Bekasi Selatan pada tahun 2024 harus melampaui target yang telah di tetapkan pada Renstra Perubahan 2024-2026.

Pada Indikator Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan yang meningkat di Kecamatan Bekasi Selatan yang dilaksanakan pada akhir tahun sebelumnya dimana masyarakat mampu berperan aktif dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Selatan. setelah diolah data tersebut memperoleh hasil capaian Pemberdayaan masyarakat sebesar 65 persen.

Sedangkan target indikator pemberdayaan masyarakat pada Renstra perubahan 2024 - 2026 sudah tidak ada lagi pada kecamatan.

Pada Indikator Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Bekasi Selatan dengan koordinasi dan sinergitas 3 Pilar (Koramil,Polsek,Kecamatan) telah melaksanakan kegiatan K3 bersama di wilayah kecamatan Bekasi Selatan.

Indikator Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Bekasi Selatan (Renstra 2024-2026 perubahan) ditargetkan sebesar 31%, Kecamatan Bekasi Selatan pada tahun 2024 harus meningkatkan Sinergitas dengan 3 pilar terkait Wilayah tertib yang ada di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan sehingga dapat melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra Perubahan 2024-2026.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bekasi Selatan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa yang akan datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi dapat menimbulkan kerugian besar.

isu-isu strategis yang ada pada Kecamatan Bekasi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat;
2. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Peningkatan Perekonomian dan Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Pemeliharaan Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan;
4. Peningkatan Ketenteraman dan Keteriban Umum di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan;
5. Pembangunan Kewilayahan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka.

Kelima hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan sering menjadi tolok ukur dari citra

(nama baik) Kecamatan Bekasi Selatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan Bekasi Selatan berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat Bekasi Selatan. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan Bekasi Selatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

2. Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial Kota Bekasi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.
3. Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi. Secara teknis, pembangunan kewilayahan merupakan sebagian wewenang dari Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Bekasi dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Dalam hal ini Kecamatan Bekasi

Selatan memfasilitasi dan meneruskan permasalahan pembangunan serta infrastruktur yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan kepada Dinas terkait melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.

4. Pemeliharaan lingkungan yang terjadi di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan yang melibatkan warga Masyarakat harus memperhatikan pelaksanaan dalam melakukan kebersihan lingkungan, dalam hal ini kecamatan Bekasi Selatan memfasilitasi dan meneruskan permasalahan kebersihan lingkungan yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan kepada dinas terkait untuk pelaksana teknis dinas yang ada di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.
5. Peningkatkan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan, dapat dilakukan dengan koordinasi antara Kecamatan Bekasi Selatan dengan instansi yang terkait ,sehingga dapat membuat masyarakat menjadi lebih nyaman dalam melakukan kegiatan yang dilakukan

Hambatan yang ada saat ini lebih terkait ke dalam hal anggaran dan kegiatan yang belum di akomodir maka dari itu setiap tahunnya Kecamatan Bekasi Selatan terus mengusulkan kegiatan yang sama agar dapat di akomodir dan tercapainya SDM Kecamatan Bekasi Selatan yang unggul dalam memberikan Pelayanan Publik.

Beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Selatan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah ;

1. Belum dioptimalkannya peran Kecamatan selaku OPD dalam perencanaan dan penganggaran;
2. Masih lemahnya koordinasi antar lintas OPD, Instansi Vertikal dalam perencanaan pembangunan;
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Adapun dampak yang ditimbulkan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPD Kota Bekasi antara lain:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel pada pemerintah kota Bekasi;
2. Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi;
3. Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan :

1. Tantangan :

- a. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;
- b. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;
- c. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan;

2. Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi:

- a. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;
 - b. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Kecamatan Bekasi Selatan dalam melaksanakan pembangunan daerah;
 - c. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan public;
 - d. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bekasi Selatan;
 - e. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan dan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Selatan.
- Formulasi Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi

Kecamatan Bekasi Selatan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Bekasi Selatan, yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat;
2. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Peningkatan Perekonomian dan Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Penguatan peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak; dan
4. Pembangunan Kewilayahan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD merupakan penjabaran dari RPJPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD juga merupakan rencana kerja yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi serta memberi peluang sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 menjabarkan Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024-2026 Kecamatan Bekasi Selatan dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan dengan berpedoman pada RKPD Kota Bekasi.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bekasi Selatan. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, Sub Kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bekasi Selatan.

Untuk menjamin kualitas Rencana Kerja yang telah disusun oleh Kecamatan Bekasi Selatan maka perlu dilakukan penelaahan atas penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan Kecamatan Bekasi Selatan.

Penelaahan tersebut dilakukan dengan melakukan Review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan melakukan analisis terhadap perbedaan karena adanya rumusan program dan kegiatan yang baru atau adanya perubahan. Review meliputi Program, Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan agar dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh Kecamatan Bekasi Selatan telah sesuai dengan kebutuhan dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam mencapai prioritas dan sasaran pembangunan tahunan.

Adapun hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD berkaitan dengan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan yang telah direncanakan dan diusulkan. Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan Kecamatan Bekasi Selatan adalah pada Program, Kegiatan dan Sub kegiatan serta pendanaannya. Hal ini dilakukan untuk menunjang dan mendukung program kegiatan Pemerintah Daerah yang tertuang didalam RPD Kota Bekasi.

Berdasarkan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan yang terdapat di Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 terdapat beberapa perubahan (penambahan) terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaannya. Perubahan tersebut didasari oleh :

Penyesuaian terhadap Renstra Kecamatan Bekasi Selatan guna mendukung Program dan Prioritas Pembangunan yang tertuang di dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026;

1. Penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149/Kep.30-Tapem/I/2023 terkait Pemberian Bantuan Operasional RW dan RT;
2. Adanya perubahan tentang penyusunan anggaran keuangan daerah yang juga mempengaruhi penambahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Adanya perubahan target indikator sesuai dengan hasil desk Renja Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-900 Tahun 2023.

Adapun perbedaan yang dimaksud pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Bekasi

Program Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Kinerja Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Renja	
		2025	
		Target	Rp
			40.017.237.600
	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan	77	
		100%	
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	27.609.237.600
	Optimaliasi Peningkatan Kapasitas aparatur	100%	
	Optimaliassi Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	100%	
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantora	100%	

Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	50,000,000
Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	50,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	13,500,000,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang	13,500,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	50,000,000
Pengadaan mesin lainnya	Tersedianya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	300,000,000

Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	300,000,000
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tersedianya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	550,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200,000,000
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	150,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	200,000,000
Administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah	100%	1,300,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	50,000,000
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	400,000,000

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	250,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	100,000,000
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Kali	250,000,000
penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	100,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	150,000,000
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	11.009.237.600
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	509.237.600
penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.500.000.000

pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	850.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	2 Unit	100.000.000
	Dibayarkan Pajaknya		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	33 Unit	250.000.000
	dan Perizinannya		
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	150.000.000
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350,000,000
	Persentase Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	12,288,000,000
	dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan		

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan yang aktif	100%	11,658,000,000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	11.183.000.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	180.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekayonjaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	300.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kayuringinjaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	300.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jakasetia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	300.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jakamulya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	300.000.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	300.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/Ormas	450.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekayonjaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	279 Pokmas/Ormas	2.300.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kayuringinjaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	269 Pokmas/Ormas	2.500.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakasetia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	259 Pokmas/Ormas	1.700.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakamulya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	123 Pokmas/Ormas	1.500.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	51 Pokmas/Ormas	953.000.000
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	100.000.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	475.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pekayonjaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga	75.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayuringinjaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga	75.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jakasetia	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga	75.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jakamulya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga	75.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Margajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga	75.000.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	100.000.000

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan masyarakat	100%	570,000,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	180,000,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	180,000,000
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	100%	390,000,000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	12 Dokumen	90,000,000
	Prasarana Pelayanan Umum		

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Pekayonjaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	12 Dokumen	60,000,000
	Prasarana Pelayanan Umum		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kayuringinjaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	12 Dokumen	60,000,000
	Prasarana Pelayanan Umum		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jakasetia	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	12 Dokumen	60,000,000
	Prasarana Pelayanan Umum		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	12 Dokumen	60,000,000

Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jakamulya	Prasarana Pelayanan Umum		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Margajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	12 Dokumen	60,000,000
	Prasarana Pelayanan Umum		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100%	60,000,000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	60,000,000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	60,000,000
			120.000.000
		100%	120.000.000

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah tertib K3	100%	120.000.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	120.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	12 Laporan	120.000.000
	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah khususnya di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yaitu melalui Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang Kecamatan merupakan Forum Musyawarah Tahunan Para Pemangku Kepentingan di Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan Prioritas Pembangunan di Wilayah Kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari Kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan.

Musrenbang Kecamatan tidak hanya menyepakati prioritas masalah daerah yang ada di Kelurahan yang di usulkan dari Musrenbang Kelurahan, tetapi untuk menghasilkan prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi urusan dan kewenangan wajib dan pilihan pemerintah daerah. Selain itu musrenbang juga merupakan forum pendidikan bagi masyarakat agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 4 Daftar Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan Bekasi Selatan TA. 2025

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	ANGGARAN
1	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jalan rusak	Jl. Nakula 6A RT. 002/008, Kota Bekasi	Jakasetia	100.000.000
2	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jalan Rusak	Jl. Nakula 6B RT. 003/008, Kota Bekasi	Jakasetia	100.000.000
3	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jl. Nakula 6C RT. 004/008	Jl. Nakula 6C RT. 004/008, Kota Bekasi	Jakasetia	100.000.000
4	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jalan Rusak	Jl. Bintang II RT 02 RW 10, Kota Bekasi	Jakasetia	100.000.000
5	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jalan Rusak dan Banjir	Jl. Matahari IV RT 02 RW 10, Kota Bekasi	Jakasetia	100.000.000
6	Perbaikan Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong	Sering terjadi genangan air	Jl. Bintang Raya RT 02 RW 10, Kota Bekasi	Jakasetia	120.000.000
7	Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong	Sering terjadi genangan air	Jl. Bintang II RT 02 RW 10, Kota Bekasi	Jakasetia	100.000.000

8	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jalan Rusak	RT. 005 Blok A s.d Blok B, Kota Bekasi	Jakasetia	185.000.000
9	Penurapan/ Tanggul Sungai	Penurapan Waduk sebelah timur antisipasi banjir	RT. 005/016 Villa Jakasetia, Kota Bekasi	Jakasetia	100.000.000
10	Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong	Pembuatan saluran air U-Dith 30cm	Jl. Kaswari Perbatasan RT. 008/001 Dengan RW. 005 Blok C, Kota Bekasi	Jakasetia	37.000.000
11	Perbaikan Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong	Saluran tidak menampung luapan air hujan	Jl. Matahari Raya RT 01 RW 10, Kota Bekasi	Jakasetia	75.000.000
12	Perbaikan Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong	Saluran tidak menampung luapan air hujan	Jl. Bintang Raya RT 04 RW 10, Kota Bekasi	Jakasetia	75.000.000
13	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jalan Rusak	Jl. Bintang II RT 02 RW 10, Kota Bekasi	Jakasetia	75.000.000
14	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jalan Rusak	Jl. Matahari III RT 02 RW 10, Kota Bekasi	Jakasetia	200.000.000
15	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jalan Rusak	Jl. Matahari IV RT 02 RW 10, Kota Bekasi	Jakasetia	200.000.000
16	Pembangunan/Renovasi Balai Warga/Kantor Sekretariat	Tidak ada tempat pelayanan masyarakat	Jl. Nakula 7A RW. 07, Kota Bekasi	Jakasetia	120.000.000
17	Pembangunan/Renovasi Balai Warga/Kantor Sekretariat	Renovasi Kantor Sekretariat RT. 001	Jl. Bintang 2 RT. 001 Rw. 007, Kota Bekasi	Jakasetia	113.000.000
18	Pembangunan Gapura perumahan	Pembangunan Gerbang Masuk Tiap RT untuk antisipasi curanmor	Lingkungan Rw. 007, Kota Bekasi	Jakasetia	100.000.000
19	Pembangunan/Renovasi Balai Warga/Kantor Sekretariat	Pembangunan Balai Pertemuan Warga ; Mencegah Lahan Fasum digunakan untuk Area Parkir Warga *di lahan Fasum seluas 20 M x 12 M, Dengan Perkiraan	Jl. Lele XII RT 011 , Kota Bekasi	Kayuringinjaya	500.000.000

		Anggaran Rp. 500.000.000			
20	Pembangunan Pagar Makam/Batas Wilayah Perumahan	Pembangunan Pagar/Tembok Pembatas Wilayah Kantor Kelurahan Kayuringn *Sisi Samping Kanan (Utara) dan Samping Kiri (Selatan) dengan Tinggi 3M, Dengan Perkiraan Anggaran Rp. 500,000,000	Kantor Kelurahan Kayuringin Jaya ; Jl Letnan Arsyad No. 1 RT 001 RW 024, Kota Bekasi	Kayuringinjaya	500.000.000
21	Penataan Kawasan Kumuh	Pedestrian Lahan Pengairan Sisi Kali Jati : Memper Indah Lingkungan dan mencegah Banguna Semi Permanen dan Parkir Liar, Dengan Perkiraan Anggaran Rp. 500,000	Sisi Kali Jati, Kota Bekasi	Kayuringinjaya	500.000.000
22	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Pengaspalan Jalan ; Jalanan Tidak Rata dan beberapa ruas Berlubang dan Bergelombang	Meliputi Jl Gunung Salak Raya RT 008 RW 012 - Jl Jati Raya RT 001 dan RT 002 RW 012 dan Jl Letnan Arsyad RW 024, Kota Bekasi, Dengan Perkiraan Anggaran 1 Miliar	Kayuringinjaya	500.000.000
23	Perbaikan/Rehabilitasi Jalan	pavingblok dan jalan rusak	jl sersan idris dalam RT 04 RW 04, Kota Bekasi	Margajaya	470.000.000

24	Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong	Banjir	Jl. Sersan idris dalam RT 04 RW 04, Kota Bekasi	Margajaya	200.000.000
25	Normalisasi saluran Air/Drainase/Gorong Gorong	Banjir (Saluran Air Lebih Tinggi dari dataran rumah)	Sepanjang Jalan Kemakmuran RT 01, RT 03, RT 04, RT 05, RW 05, Kota Bekasi	Margajaya	800.000.000
26	Normalisasi saluran Air/Drainase/Gorong Gorong	Banjir	Lanjuta Normalisasi Jl. Kemakmuran di JL. IR H Juanda RT 01 RW 06, Kota Bekasi	Margajaya	500.000.000
27	Pembinaan dan Pelatihan dalam rangka pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan keluarga	Kurangnya Pengetahuan di masyarakat	seluruh kader di RW Kelurahan Margajaya, Kota Bekasi	Margajaya	30.000.000
28	Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong	Saluran air yang ada dangkal dan kecil	Jl Ketapang Raya RT 05 RW 01, Kota Bekasi	Pekayonjaya	200.000.000
29	Perbaikan Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong	Saluran air yang ada dangkal dan kecil sehingga air meluap ke jalan	Jl Gg Damai RT 03 RW 02, Kota Bekasi	Pekayonjaya	150.000.000
30	Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong	Saluran air yang ada kecil dan dangkal	Jl Sersan Marjuki RT 01,02,04,05,06 RW 03, Kota Bekasi	Pekayonjaya	250.000.000
31	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jalan yang ada rusak dan berlubang	Pekayon Jaya RT 02 RW 04, Kota Bekasi	Pekayonjaya	180.000.000
32	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jalan sudah rusak dan berlubang	Jl Damar 8 RT 05 RW 05, Kota Bekasi	Pekayonjaya	64.992.000
33	Perbaikan/Rehabilitasi Jalan	Jalan yang ada sudah rusak dan berlubang	Jl. Delta Barat XI RT 03 RW 07, Kota Bekasi	Pekayonjaya	80.000.000
34	Perbaikan Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong	Saluran air kecil dan dangkal	Jl Kenari Raya RT 01 RW 08, Kota Bekasi	Pekayonjaya	75.000.000
35	Pembangunan Pagar Makam/Batas Wilayah Perumahan	Pagar yang ada rusak perlu perbaikan	Balai Warga RW 09, Jalan Meranti 3, Pekayon Jaya Bekasi 17148 , Kota Bekasi	Pekayonjaya	50.000.000
36	Perbaikan Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong	Saluran air yang ada kecil dan dangkal	Jl Elang 5 dan 6 RT 01 RW 10, Kota Bekasi	Pekayonjaya	300.000.000

37	Pembuatan Lubang Biopori	tidak adanya sumur resapan apabila hujan terjadi genangan air	Jl Elang X RT 04 RW 11, Kota Bekasi	Pekayonjaya	35.000.000
38	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jalan yang ada rusak dan berlubang	Jl Pulo Sirih Tengah 5 RT 09 RW 13, Kota Bekasi	Pekayonjaya	62.932.500
39	Pembangunan/Renovasi Balai Warga/Kantor Sekretariat	Kantor Sekretariat RW sudah rusak perlu renovasi	Jl Palem Barat IX Blok CC 30 No.9 RT 01 RW 16, Kota Bekasi	Pekayonjaya	71.800.000
40	Pembangunan/Renovasi Balai Warga/Kantor Sekretariat	Belum adanya pos keamanan	Jl Palem Timur II Blok CC 21 No.1 RT 01 RW 17, Kota Bekasi	Pekayonjaya	40.000.000
41	Pembangunan/Renovasi Balai Warga/Kantor Sekretariat	perlu adanya perbaikan balai atau posko relawan untuk antisipasi bencana	PPI Blok CC Palem Raya RT 03 RW 18, Kota Bekasi	Pekayonjaya	75.000.000
42	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tidak mempunyai mesin pencacah rumput	Pulo Permatasai RT 01 RW 19, Kota Bekasi	Pekayonjaya	25.000.000
43	Pembangunan/Renovasi Balai Warga/Kantor Sekretariat	Tidak mempunyai pos keamanan	Pekayon Jaya RT 02 RW 21, Kota Bekasi	Pekayonjaya	40.000.000
44	Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong	Tidak ada saluran air apabila hujan air menggenang	Pekayon Jaya RT 04 RW 22, Kota Bekasi	Pekayonjaya	100.000.000
45	Perbaikan Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong	Saluran air yang ada kecil dan dangkal	Taman Century 2 Blok N RT 03 RW 23, Kota Bekasi	Pekayonjaya	34.562.075
46	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Perlu adanya tungku pemusnah sampah sehingga sampah bisa di minimalisir untuk pembuangan akhirnya	Griya Metropolitan RT 01 RT 02 RW 24, Kota Bekasi	Pekayonjaya	75.998.000

47	Pembuatan Lubang Biopori	Perlu adanya sumur resapan atau lubang biopori sehingga air tidak menggenang	Jl Gg H Ranta RT 03 RW 26, Kota Bekasi	Pekayonjaya	45.000.000
48	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	belum adanya kantor sekretariat rw 01	jl H Anwar Rt 001 Rw 01 Jakamulya Bekasi Selatan, Kota Bekasi	Jakamulya	150.000.000
49	Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong	Belum adanya saluran air yang memadai di jalan Raya Cikunir RT 01 RW 02	Jalan Raya Cikunir Rt 01 Rw 02, Kota Bekasi	Jakamulya	200.000.000
50	Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong	Saluran air kurang lancar	Jl Raya Cikunir RT 02 RW 03, Kota Bekasi	Jakamulya	150.000.000
51	Pembangunan Taman	Taman kurang rapi	jl Kutilang dan jl Puyuh RW 04, Kota Bekasi	Jakamulya	100.000.000
52	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jalan Rusak	Jl Medan III RT 03 RW 05 Jakamulya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Jakamulya	90.000.000
53	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jalan Rusak	Jl Pelangi IV Rt 002 RW 06 Jakamulya Bekasi Selatan, Kota Bekasi	Jakamulya	110.000.000
54	Rehabilitasi Jembatan	Perlu pelebaran jembatan	Jl Barito raya, jl barito 2, jl Sadewa RW 07 Jakamulya Bekasi Selatan, Kota Bekasi	Jakamulya	150.000.000
55	Normalisasi saluran Air/Drainase/Gorong Gorong	Saluran air kurang lebar debit air melimpah	Kali Cakung RT 007, RT 008 RW 10, Kota Bekasi	Jakamulya	302.000.000
56	Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong	Saluran air kurang lancar	Jl Nusantara Raya RT 008 RW 11 Jakamulya Bekasi Selatan, Kota Bekasi	Jakamulya	100.000.000
57	Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong	Perlu adanya BOX Culvert	Jl Nusantara Raya RW 11 Jakamulya Bekasi Selatan, Kota Bekasi	Jakamulya	78.000.000

58	Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong	saluran air kurang memadai	saluran air (Dpn Rumah pa Agus) RT 001 RW 12, Kota Bekasi	Jakamulya	200.000.000
59	Penurapan/ Tanggul Sungai	Lanjutan Turap beton rawa	Rawa Belakang RT 009 RW 13 Jakamulya Bekasi Selatan, Kota Bekasi	Jakamulya	250.000.000
60	Pembangunan Pagar Makam/Batas Wilayah Perumahan	Perlu perbaikan pagar tembok pembatas	Tembok Pembatas Perum MRC RW 16 Jakamulya Bekasi Selatan, Kota Bekasi	Jakamulya	75.000.000
61	Normalisasi saluran Air/Drainase/Gorong Gorong	Perlu adanya Crossing saluran air Palem raya ke kalibaru	Jl Palem Raya dpn Alfamart RW 08 Jakamulya Bekasi Selatan, Kota Bekasi	Jakamulya	45.000.000
TOTAL					9.955.284.575

Daftar Lengkap Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan di lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi tidak ada yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Tabel 5 Usulan dan Telaahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Bekasi Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<i>N I H I L</i>			

No	Program	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Indikator Kinerja	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<i>N I H I L</i>			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional*

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan Good Governance dan Akuntabilitas Publik.

Arah Kebijakan Umum Nasional bagi Kecamatan yaitu merupakan keselarasan antara kebijakan Umum Nasional dengan Kebijakan Umum Pemerintah Kota Bekasi, antara lain :

1. Pembangunan SDM

- Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global..

2. Pembangunan Infrastruktur

- Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

- Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

- Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja,

memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

- Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Renja Kemendagri memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Bekasi Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa sasaran kebijakan dalam renja kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Bekasi Selatan dengan ditanda tangannya hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan disediakan ruang bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bekasi Selatan

Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi maka Kecamatan adalah Unsur Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan dibidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi, melaksanakan dan mendukung Program Prioritas Pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi terutama Program Prioritas yang tercantum dalam Misi Kesatu yaitu Program Pengembangan Layanan Publik Berbasis IT, Program Peningkatan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Melalui Pemberian Aspirasi dan Insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid dan Kelompok Penggerak Sosial Lainnya dan Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Penyusunan Renja Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Tahun 2025 ini mengacu kepada Renstra Tahun 2024-2026 Kecamatan Bekasi Selatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk menjalankan tugas tersebut, maka berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi. Camat bantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan. Serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan dan kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Seksi Kesejahteraan Sosial menanganimempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahtraan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Seksi Keamanan Ketertiban menanganimempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain tugas pokok di atas, Camat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan sesuai dengan Misi Daerah;
- b. Penetapan program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada misi kecamatan;
- c. Penetapan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;

- d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama di lingkungan Kecamatan;
- h. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan perekonomian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup serta sosial budaya di lingkungan kecamatan;
- i. Penyelenggaraan perizinan tertentu yang dilimpahkan oleh Wali Kota;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan perangkat daerah dan lembaga / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
- k. Pembinaan dan Pengendalian tugas yang dilaksanakan Lurah;
- l. Pembinaan dan pengendalian, administrasi keuangan kepegawaian dan urusan rumah tangga kecamatan;
- m. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;
- n. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas UPTD, UPTB di wilayah kerjanya
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan kelurahan;
- p. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- q. Pembinaan administrasi perkantoran serta tatalaksana pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- r. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup kecamatan dan kelurahan;

- s. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
- t. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
- u. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- v. Pemberian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kecamatan kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- w. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Wali Kota.

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Bekasi Selatan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Bekasi Selatan.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Capaian Nilai Zona Integritas (ZI).

2. Mewujudkan Kecamatan Bekasi Selatan yang Tertib dan Aman.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Pesentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Selatan untuk jangka waktu 3 tahun kedepan,

Kecamatan Bekasi Selatan menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.

2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

3. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun ke depan.

Tabel 5 Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bekasi Selatan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Bekasi Selatan	Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik;
		Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Terwujudnya Kecamatan Bekasi Selatan yang Tertib dan Aman	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan program/kegiatan kewilayahan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan berasal dari berbagai pertimbangan. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berdasarkan dengan peraturan diatas sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan maka perlu dirumuskan Program, Kegiatan sampai Sub Kegiatan.

Kecamatan Bekasi Selatan di tahun 2025 memiliki 4 Program BLU dan 1 Program BLPU dengan kegiatan sebanyak 20 dan Sub Kegiatan sebanyak 48. Lokasi program dan kegiatan tersebar ke berbagai titik di 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan.

Dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian target global yang dirancang oleh PBB untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan di seluruh dunia. Salah satu tujuan utama dari SDGs adalah pengentasan kemiskinan. Pencapaian SDGs untuk pengentasan kemiskinan melibatkan sejumlah langkah dan upaya yang kompleks diantaranya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin adapun upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Selatan

untuk mengentaskan tingkat kemiskinan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mempunyai Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dimana nantinya dengan Sub Kegiatan yang ada ini dapat memfasilitasi seluruh UMKM yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan dapat memasarkan produknya pada setiap kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bekasi Selatan.

Tabel 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
	KECAMATAN BEKASI SELATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekayonjaya
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kayuringinjaya
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jakasetia
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jakamulya
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margajaya
7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan
8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekayonjaya
9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kayuringinjaya
10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakasetia
11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakamulya
12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margajaya
13	Evaluasi Kelurahan
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pekayonjaya
2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kayuringinjaya
3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jakasetia
4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jakamulya
5	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Margajaya
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan)
2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Pekayonjaya)
3	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kayuringinjaya)
4	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Jakasetia)
5	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Jakamulya)
6	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Margajaya)
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bekasi Selatan

Terdapat 5 Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan terdiri dari 13 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan dengan Total Pagu sebesar Rp. 37.369.492.495,- Program yang dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Selatan mendukung Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2024-2026. Adapun Rencana Program dan Pendanaannya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: Rp. 24.867.474.920,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan: Rp. 12.980.088.575,-
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik: Rp.282.500.000,-
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum: Rp. 40.000.000,-
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sarana Pelayanan Umum: Rp. 50.000.000,-

Tabel 7 Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Tahun 2024

NO	BLPU/BLU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU 2025	KET
1	BLU	4	6	28	13.270.088.575	
2	BLPU	1	7	18	24.867.474.920	
	TOTAL	5	13	9	37.369.492.495	

Uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif akan dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut :

Tabel 8 Program Dan Pagu Indikatif Kegiatan Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					
							Indikator Kinerja	Target Kinerja			Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
								Program	Program	Kegiatan		
1						2	3	7	8	9		13
						Total KCBS						37.369.492.495
KECAMATAN BEKASI SELATAN												24.867.474.920
7	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						24.016.903.920
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				10.000.000
7	1	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%				10.000.000
7	1	1	2.01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	14 Laporan			PAD	10.000.000

						Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%					19.975.087.600
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%					19.975.087.600
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/Bulan				PAD	19.965.087.600
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 laporan				PAD	10.000.000
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					100.000.000
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%					100.000.000
7	1	1	02,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang				PAD	25.000.000
7	1	1	02,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang				PAD	75.000.000

						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				595.000.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%				595.000.000
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 Paket			PAD	20.000.000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			PAD	300.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			PAD	100.000.000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			PAD	50.000.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			PAD	120.000.000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen			PAD	5.000.000

7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%					235.000.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit				PAD	235.000.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%					2.511.816.320
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				PAD	323.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				PAD	2.188.816.320
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%					590.000.000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit				PAD	90.000.000

7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit			PAD	250.000.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit			PAD	100.000.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit			PAD	150.000.000
TOTAL BLPU KECAMATAN BEKASI SELATAN											24.016.903.920
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%				82.500.000
7	1	2	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bekasi Selatan	100%				42.500.000
7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen			PAD	42.500.000

7	1	2	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Bekasi Selatan	100%					40.000.000
7	1	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan				PAD	40.000.000
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%					678.071.000
7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Selatan	100%					603.071.000
7	1	3	2,02	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan				PAD	120.000.000
7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/ Ormas				PAD	433.071.000

7	1	3	2,02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6 Laporan			PAD	50.000.000
7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Selatan	100%				75.000.000
7	1	3	2,03	3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan			PAD	75.000.000
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik	82.5				
						Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%				
						Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Bekasi Selatan	100%				
7	1	4			Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib K3 di Kecamatan Bekasi Selatan	100%				40.000.000
7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Selatan	100%				40.000.000

7	1	4	2,01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas engan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			PAD	40.000.000
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%				50.000.000
7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Bekasi Selatan	100%				50.000.000
7	1	5	2,01	5	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan			PAD	50.000.000
TOTAL BLU KECAMATAN BEKASI SELATAN											768.071.000
KELURAHAN PEKAYONJAYA											3.126.653.175
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik	82.5				
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%				40.000.000

7	1	2	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bekasi Selatan	100%					40.000.000
7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen			PAD		40.000.000
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%					3.086.653.175
7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Selatan	100%					3.046.653.175
7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			PAD		745.284.575
7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	279 Pokmas/Ormas			PAD		2.301.368.600

7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Selatan	100%					40.000.000
7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan			PAD		40.000.000
KELURAHAN KAYURINGINJAYA												2.968.638.800
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik	82.5					
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%					40.000.000
7	1	2	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bekasi Selatan	100%					40.000.000
7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen			PAD		40.000.000

7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%				2.928.638.800
7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Selatan	100%				2.888.638.800
7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		PAD		200.000.000
7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	269 Pokmas/Ormas				2.688.638.800
7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Selatan	100%				40.000.000
7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		PAD		40.000.000
KELURAHAN JAKASETIA											2.550.377.600
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik	82.5				

7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%				40.000.000
7	1	2	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bekasi Selatan	100%				40.000.000
7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen		PAD		40.000.000
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%				2.510.377.600
7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Selatan	100%				2.470.377.600
7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		PAD		662.000.000
7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	259 Pokmas/Ormas		PAD		1.808.377.600

						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Selatan	100%					40.000.000
7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan			PAD		40.000.000
KELURAHAN JAKAMULYA												2.427.704.000
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik	82.5					
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%					40.000.000
7	1	2	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bekasi Selatan	100%					40.000.000

7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen		PAD	40.000.000
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%			2.387.704.000
7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Selatan	100%			2.347.704.000
7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		PAD	748.000.000
7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	123 Pokmas/Ormas		PAD	1.599.704.000
7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Selatan	100%			40.000.000

7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan			PAD	40.000.000
KELURAHAN MARGAJAYA											1.428.644.000
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik	82.5				
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%				40.000.000
7	1	2	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bekasi Selatan	100%				40.000.000
7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen			PAD	40.000.000
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%				1.388.644.000

7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Selatan	100%					1.348.644.000
7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			PAD		430.000.000
7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	51 Pokmas/Ormas					918.644.000
7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Selatan	100%					40.000.000
7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraakan	2 Lembaga Kemasyarakatan			PAD		40.000.000

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Bekasi Selatan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kota Bekasi.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bekasi Selatan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan dalam proses penyusunannya mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas output perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah dengan tolak ukur kinerja adalah capaian RPD Kota Bekasi 2024-2026. Proses penyusunan Rencana Kerja ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam Rencana Kerja secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan..

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bekasi Selatan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan draft Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Pelaksanaan Rencana Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025

- diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat dengan Sekretaris Kecamatan Bekasi Selatan;
2. Seluruh komponen seksi dan sub bagian pada Kecamatan Bekasi Selatan agar melaksanakan program-program dalam Rencana kerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
 3. Program-program yang tercantum dalam Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya namun juga harus memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;
 4. Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
 5. Agar Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Kecamatan Bekasi Selatan diharapkan mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas;
 6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025, sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing seksi/bagian;
 - b. Camat Bekasi Selatan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan

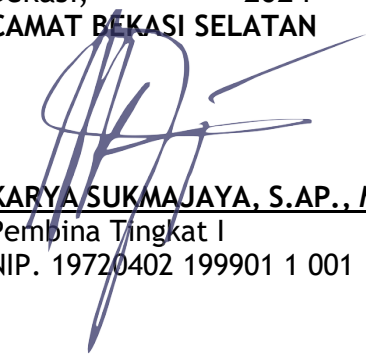
kewenangannya;

- c. Kepala seksi melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja seksi periode sebelumnya;
- d. Camat Bekasi Selatan menyusun evaluasi rencana kerja berdasarkan hasil evaluasi bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
- e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya.

Sebagai akhir kata, kami berserta aparat perangkat daerah yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi mengharapkan agar Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dapat memenuhi akuntabilitas kami kepada Pemerintah Kota Bekasi dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kerja di masa yang akan datang.

Sangat disadari masih banyak terdapat kekurangan dalam laporan ini baik dari segi sistematika penyusunan maupun data yang disampaikan, bimbingan dan arahan serta saran untuk perbaikan sangat kami harapkan.

Bekasi, 2024
CAMAT BEKASI SELATAN


KARYA SUKMAJAYA, S.AP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720402 199901 1 001